

PREVALENSI RUMAHTANGGA YANG DEFISIT KALORI ATAU PROTEIN DI INDONESIA

Oleh : Mashari Sudjono, Djumadiah Ahunain
Abas Basuni Jahari, dan Iman Sumarno

ABSTRAK

Data konsumsi makanan 49 513 rumahtangga sampel SUSENAS 1984 yang belum disesuaikan (unadjusted) telah dianalisis dengan tujuan untuk memperkirakan prevalensi rumahtangga yang mengalami defisit kalori atau protein. Berbeda dengan cara yang dilakukan peneliti lain, pada penelitian ini pendekatan dilakukan dengan membandingkan langsung konsumsi dan kebutuhan energi masing-masing rumahtangga. Cara ini juga diterapkan dalam memperkirakan defisit protein. Batas konsumsi yang digolongkan "defisit" adalah 70% kebutuhan keluarga. Didapatkan rata-rata konsumsi energi dan protein rumahtangga, masing-masing, 1905 Kalori dan 41.0 gram per hari, sementara kebutuhan rata-rata 1963 Kalori dan 42.0 gram protein. Diperkirakan 21.4% rumahtangga mengalami defisit kalori dan 16.8% mengalami defisit protein. Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa di Indonesia terdapat rumahtangga yang mengalami defisit kalori dan defisit protein (DKDP) 13.31%, di pedesaan 11.91%, di perkotaan 16.39%. Untuk rumahtangga yang mengalami defisit kalori cukup protein (DKCP) angka-angka itu, masing-masing berturut-turut, 8.04%, 6.61% dan 11.2%; yang mengalami cukup kalori defisit protein (CKDP) 3.64%, 3.91% dan 2.46%; sementara yang cukup kalori cukup protein (CKCP) 75.19%, 77.56%, dan 69.85%.

PENDAHULUAN

Kurang kalori atau protein (KKP) sampai kini masih merupakan masalah gizi utama di Indonesia. Untuk mengatasi masalah tersebut diperlukan perencanaan yang baik dan pengambilan keputusan yang tepat dalam penyusunan serta penetapan program pangan dan gizi. Informasi yang tepat-guna tentang besar, luas dan sebaran masalah KKP di Indonesia, dengan demikian, perlu disediakan.

Masalah KKP lebih banyak ditentukan oleh tingkat konsumsi energi atau protein. Berdasarkan pertimbangan ini, beberapa peneliti mencoba memperkirakan jumlah penduduk yang mengalami defisit kalori atau defisit protein dengan cara membandingkan tingkat konsumsi (menurut data SUSENAS) dengan tingkat kebutuhan pada nilai batas 1700 Kalori (1), (2), (3). Dalam menganalisis data konsumsi, mereka menggunakan angka rata-rata untuk berbagai kelompok pengeluaran, dan

angka rata-rata kebutuhan nasional sebagai pembanding. Tetapi, data kebutuhan energi maupun protein umumnya menyebar menurut sebaran normal, dan karena data konsumsi juga menyebar sekitar angka rata-ratanya, maka suatu tingkat konsumsi rumah tangga yang berada di bawah angka rata-rata kebutuhan, misalnya 1700 Kalori, tidak selalu dapat dinyatakan defisit; demikian pula sebaliknya. Informasi yang didapat menjadi kurang tepat (akurat).

Sukhatme (4) dalam memperkirakan jumlah penduduk dunia yang mengalami defisit kalori juga berdasarkan angka rata-rata konsumsi dan dengan asumsi bahwa data konsumsi serta kebutuhan energi menyebar menurut sebaran normal. Cara ini dikembangkan Reutlinger dan Selowsky dengan mempertimbangkan sebaran penduduk menurut golongan pendapatan; dan disempurnakan lagi oleh Reutlinger dan Alderman (6).

Dalam memperkirakan jumlah rumah tangga yang mengalami defisit kalori atau protein, pendekatan lain dapat dilakukan dengan membandingkan langsung antara data konsumsi dan kebutuhan energi maupun protein masing-masing rumah tangga. Cara ini yang diterapkan dalam studi yang hasilnya dikemukakan dalam tulisan ini. Studi ini sendiri merupakan bagian dari "Studi tentang profil kelompok masyarakat dengan konsumsi kalori dan protein lebih rendah dari tingkat kebutuhannya"(7).

BAHAN DAN CARA

Data yang dianalisis adalah sebagian dari data sampel SUSENAS (Survei Sosial dan Ekonomi Nasional) 1984. Jumlah sampel SUSENAS 1984 lebih dari 50.000. Setelah dilakukan pembersihan data dengan mengeluarkan data konsumsi yang ekstrim, sampel yang datanya dianalisis hanya 49.513 rumah tangga.

Pemilihan sampel SUSENAS dirancang untuk mewakili populasi daerah pedesaan dan perkotaan di masing-masing propinsi dan di Indonesia -- khusus untuk propinsi Irian Jaya dan Timor Timur, liputan survei terbatas pada desa yang mudah dicapai. Pola ini pula yang diikuti dalam penyajian hasil studi ini.

Konsumsi energi dan protein masing-masing rumahtangga dihitung atas dasar kuantitas masing-masing jenis bahan makanan dan minuman yang dikonsumsi rumahtangga dengan menggunakan Daftar Komposisi Bahan Makanan (DKBM) terbitan Direktorat Gizi (8).

Untuk analisis dilakukan langkah-langkah berikut :

1. menghitung rata-rata konsumsi energi dan protein per orang per hari, yaitu jumlah energi atau protein yang dikonsumsi rumahtangga dibagi dengan jumlah anggota rumahtangga bersangkutan;
2. menghitung kebutuhan energi dan protein rumahtangga dengan menggunakan rumus:

$$\text{Kebutuhan energi rumahtangga (RT)} = \frac{\text{UK} \times 2380}{\text{jumlah anggota RT}}$$

$$\text{Kebutuhan protein rumahtangga(RT)} = \frac{\text{UP} \times 49}{\text{jumlah anggota RT}}$$

UK (unit kalori) dan UP (unit protein) adalah nilai 1 (satu) untuk seorang pria dewasa yang kebutuhan energi dan proteinnya 2380 Kalori dan 49 gram sehari. Anggota keluarga yang tingkat kebutuhannya berbeda dihitung sebagai nisbah (ratio) terhadap kebutuhan pria dewasa tersebut (10). Dengan menggunakan Daftar Kecukupan Energi dan Zat Gizi yang Dianjurkan (11),(12) yang diubah dalam satuan UK dan UP menurut golongan umur serta jenis kelamin, dihitung jumlah UK dan UP untuk masing-masing rumahtangga;

3. menghitung dan menetapkan batas konsumsi yang dinyatakan sebagai "defisit kalori" dan "defisit protein".

Analisis dilakukan untuk memperoleh perkiraan sebaran rumahtangga yang mengalami defisit kalori maupun protein menurut propinsi dan daerah (pedesaan dan perkotaan) di Indonesia.

HASIL DAN BAHASAN

Rata-rata konsumsi secara nasional, menurut hasil analisis data SUSENAS 1984, adalah 1905 Kalori dan 46.1 gram protein per orang per hari -- suatu tingkat tertinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Perubahan rata-rata konsumsi energi secara nasional sejak tahun 1964 hingga 1984 (Tabel 1) menggambarkan terjadinya peningkatan taraf hidup masyarakat Indonesia. Jika dibandingkan rata-rata konsumsi energi berbagai daerah antara tahun 1980 dan 1984 (Tabel 2), tampak peningkatan konsumsi energi di propinsi DKI Jakarta, Nusa Tenggara Timur, Bengkulu, dan Maluku.

Jika dibandingkan konsumsi rata-rata menurut daerah (Tabel 3, dan 4) tampak bahwa di pedesaan cenderung konsumsi energi lebih tinggi daripada di perkotaan, tetapi konsumsi protein malah sebaliknya. Juga tampak keragaman konsumsi, baik energi maupun protein, antara propinsi.

Sebagaimana tampak pada Tabel 3 dan 4, kebutuhan energi maupun protein tidak banyak berbeda, baik antara propinsi maupun antar desa dan kota. Ini berarti bahwa perkiraan rata-rata kebutuhan energi maupun protein untuk tingkat nasional dapat diterapkan dalam membandingkan konsumsi dengan kebutuhan di berbagai daerah di Indonesia.

Analisis lebih lanjut dilakukan dengan mengelompokkan rumah-tangga sampel menjadi kelompok rumahtangga yang (1) defisit kalori dan defisit protein (DKDP), (2) defisit kalori tetapi cukup protein (DKCP), (3) cukup kalori tetapi defisit protein (DKDP), dan (4) cukup kalori dan cukup protein (CKCP). Yang dimaksud dengan defisit dalam hal ini adalah apabila tingkat konsumsi suatu rumahtangga kurang dari 70% kebutuhan rumahtangga tersebut. Hasil analisis tampak seperti pada Tabel 5, 6, dan 7.

Di antara kelompok rumahtangga yang mengalami defisit kalori dan/atau protein, ternyata kelompok rumahtangga yang mengalami defisit kalori dan juga defisit protein (DKDP) merupakan yang tertinggi prevalensinya, dan karena itu perlu lebih mendapat perhatian. Kelompok ini, umumnya, merupakan golongan termiskin, sementara data konsumsi golongan ini memiliki tingkat ketelitian yang lebih tinggi daripada golongan lainnya. Dengan demikian, prevalensi DKDP dapat dipercaya dan dapat digunakan sebagai bahan dalam perencanaan program pangan dan gizi khususnya, atau pembangunan pada umumnya.

Tabel 1. Rata-rata konsumsi energi dan protein di Indonesia dihitung dari hasil SUSENAS

	1964 ¹⁾	1974 ²⁾	1976 ³⁾	1981 ³⁾	1984 ⁴⁾
Energi (Kalori)	1671	1850	1894	1685	1905
Protein (Gram)	37,0	42,1	41,1	40,4	46,1

Sumber: 1) NAS-LIPI Workshop on Food, Jakarta 1968
 2) Suwarno F. dengan F.G. Winarno, Widya Karya Nasional
 3) Status Potensi Sumberdaya Pangan dan Gizi, Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi 1983
 4) SUSENAS 1984

Tabel 2. Perkembangan konsumsi energi di berbagai propinsi di Indonesia

Rata-rata Konsumsi Energi (Kalori)	1080 ¹⁾	1984 ²⁾
1600	DKI Jakarta DI Yogyakarta	DI Yogyakarta
1600 - 1800	Jateng, Jatim, NTB, NTT, Irian Jaya	DKI Jakarta Jateng, Jatim, NTB
1800 - 2100	Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Bengkulu, Lampung, Jabar, Bali, Kalteng, Kalsel, Kaltim, Sulut, Sulsel, Maluku	Irian Jaya, Sumut, Sumsel, Bali, Jabar, Lampung, Sumbar, Timtim, Kalteng, Kaltim, Kalbar, Kalsel, Sulut, Sulsel, Riau, Jambi, NTT
2100	Sulteng, Timtim, Kal. bar, Sultara, DI Aceh, Sumsel	Sulteng, Bengkulu, Maluku, Sultara, DI Aceh

Sumber: 1) Suparmoko, M. dan Dibyso Prabowo, 1984
 Diolah dari Indikator Kesejahteraan Rakyat, 1982, BPS.
 2) SUSENAS 1984

Tabel 3. Rata-rata konsumsi dan kebutuhan energi rumah-tangga per orang per hari di berbagai propinsi di Indonesia

No. Propinsi	Konsumsi Energi (Kalori)			Kebutuhan Energi(Kalori)		
	Desa	Kota	Total	Desa	Kota	Total
1. DI Aceh	2452	2109	2377	1982	2044	1996
2. Sumut	1943	1728	1874	1946	1987	1958
3. Sumbar	2049	1735	1966	1944	1999	1958
4. Riau	2128	1951	2066	1976	1987	1980
5. Jambi	2184	1843	2072	1976	2007	1990
6. Sumsel	1968	1783	1903	1969	1993	1978
7. Bengkulu	2304	1949	2196	1971	1992	1977
8. Lampung	2308	1686	1959	1961	1984	1966
9. DKI Jakarta ¹⁾	-	1622	1622	-	1996	1996
10. Jabar	2055	1777	1940	1970	1981	1973
11. Jateng	1668	1609	1652	1979	1998	1984
12. DI Yogyakarta	1625	1477	1584	1985	2023	1995
13. Jatim	1727	1592	1694	2009	2012	2009
14. Bali	1915	1878	1905	1991	2022	1999
15. NTB	1758	1720	1747	1948	1996	1961
16. NTT	2065	2137	2081	1956	2020	1971
17. TimTim ²⁾	1968	-	1968	1996	-	1996
18. Kalbar	2033	1811	1971	1990	2011	1996
19. Kalteng	1905	1957	1920	1969	2012	1981
20. Kalsel	2054	1827	1987	1996	1987	1993
21. Kaltim	1933	1956	1939	2000	2002	2000
22. Sulut	2003	2062	2021	1987	2021	1998
23. Sulteng	2219	2095	2181	1987	2023	1998
24. Sulsel	2175	1848	2067	1969	2016	1984
25. Sultara	2402	2157	2324	1943	1984	1956
26. Maluku	2540	1772	2258	1927	2022	1962
27. Irian Jaya	1854	1912	1871	1975	2018	1987
28. Indonesia	1964	1776	1905	1975	2001	1983

Keterangan : 1) Semua sampel di DKI Jakarta dari daerah perkotaan
 2) Semua sampel di Timtim dari daerah pedesaan

Tabel 4. Rata-rata konsumsi dan kebutuhan protein rumah-tangga per orang per hari di berbagai propinsi di Indonesia

No.	Propinsi	Konsumsi Protein (Gram)			Kebutuhan Protein(Gram)		
		Desa	Kota	Total	Desa	Kota	Total
1.	DI Aceh	58,9	55,8	58,2	41,8	43,3	42,2
2.	Sumut	46,6	44,8	46,0	41,4	42,3	41,7
3.	Sumbar	44,0	42,1	43,5	41,6	42,4	41,8
4.	Riau	48,4	49,0	48,6	41,6	41,8	41,7
5.	Jambi	50,5	46,9	49,3	41,6	42,2	41,8
6.	Sumsel	45,6	45,9	45,7	41,8	42,1	41,9
7.	Bengkulu	53,2	44,6	50,6	41,6	42,6	41,8
8.	Lampung	42,6	39,7	41,9	41,5	42,2	41,7
9.	DKI Jakarta ¹⁾	-	40,5	40,5	-	42,1	42,1
10.	Jabar	49,2	46,0	48,3	41,7	42,1	41,8
11.	Jateng	39,5	41,0	39,9	42,2	42,7	42,3
12.	DI Yogyakarta	37,4	36,0	37,0	42,8	42,4	43,0
13.	Jatim	42,2	41,1	41,9	42,7	42,8	42,7
14.	Bali	44,5	44,7	44,5	42,6	43,2	48,8
15.	NTB	41,1	41,6	41,2	41,2	42,6	41,5
16.	NTT	52,3	56,5	43,3	41,4	43,3	41,5
17.	Timtim ²⁾	51,0	-	51,0	42,3	-	42,3
18.	Kalbar	49,3	48,9	49,2	41,9	42,8	42,2
19.	Kalteng	45,5	53,7	47,8	41,4	42,6	41,7
20.	Kalsel	50,2	48,0	49,6	42,2	41,9	42,1
21.	Kaltim	50,7	52,1	51,1	42,1	42,2	42,1
22.	Sulut	49,2	51,7	50,0	42,2	42,9	42,5
23.	Sulteng	41,4	49,0	43,7	42,1	42,4	42,3
24.	Sulsel	55,0	48,5	52,9	42,0	42,8	42,3
25.	Sultara	52,6	59,6	54,9	41,4	42,4	41,7
26.	Maluku	55,4	46,5	52,1	40,6	43,0	41,5
27.	Irian Jaya	43,0	47,6	44,3	41,6	42,8	42,0
28.	Indonesia	46,4	45,3	46,1	42,0	42,5	42,1

Keterangan : 1) Semua sampel di DKI Jakarta dari daerah perkotaan
 2) Semua sampel di Timtim dari daerah pedesaan

Tabel 5. Sebaran rumahtangga menurut kualitas konsumsi energi dan protein per orang per hari di berbagai propinsi di Indonesia *)

No.	Propinsi	DKDP ¹⁾		DKCP ²⁾		CKDP ³⁾		CKCP ⁴⁾	
		n	%	n	%	n	%	n	%
1.	DI Aceh	65	4,04	62	3,86	12	0,75	1468	91,35
2.	Sumut	199	8,65	195	8,47	29	1,26	1878	81,62
3.	Sumbar	153	8,64	66	3,73	77	4,35	1475	83,29
4.	Riau	73	5,49	54	4,06	47	3,53	1156	86,92
5.	Jambi	60	6,40	58	6,18	10	1,07	810	86,35
6.	Sumsel	228	11,20	119	5,89	70	3,46	1605	79,38
7.	Bengkulu	21	3,47	8	1,32	9	1,58	568	83,73
8.	Lampung	275	14,67	69	3,68	160	8,54	1370	73,11
9.	DKI Jakarta	430	20,65	298	14,31	55	2,64	1299	62,39
10.	Jabar	413	8,91	323	6,50	61	1,23	4146	83,37
11.	Jateng	1046	21,97	509	10,69	226	4,75	2979	62,58
12.	DI Yogyakarta	534	30,53	156	8,92	136	7,78	923	52,77
13.	Jatim	1028	18,80	793	14,50	186	3,40	3462	63,30
14.	Bali	169	8,24	88	4,29	90	4,39	1705	83,09
15.	NTB	455	21,71	144	6,87	93	4,44	1404	66,98
16.	NTT	215	13,26	143	8,82	23	1,42	1240	76,50
17.	Timtim	82	22,28	32	8,70	8	2,17	246	66,85
18.	Kalbar	125	8,26	147	9,71	30	1,98	1212	80,05
19.	Kalteng	62	9,40	44	6,67	23	3,48	531	80,45
20.	Kalsel	119	7,65	137	8,82	16	1,03	1282	82,50
21.	Kaltim	65	7,65	84	9,88	15	1,76	686	80,71
22.	Sulut	163	12,09	100	7,42	33	2,45	1052	79,04
23.	Sulteng	59	9,69	18	2,96	94	15,44	438	71,92
24.	Sulsel	227	10,01	169	7,45	35	1,54	1836	80,99
25.	Sultara	88	4,49	104	5,31	95	4,85	1671	85,34
26.	Maluku	81	16,23	23	4,61	42	8,42	353	70,74
27.	Irian Jaya	123	19,37	40	6,30	40	6,30	432	68,03
28.	Indonesia	6588	13,31	3983	8,04	1715	3,46	37227	75,19

Keterangan : *) Kecukupan dihitung pada batas 70% kebutuhan

1) DKDP = Defisit Kalori Defisit Protein

2) DKCP = Defisit Kalori Cukup Protein

3) CKDP = Cukup Kalori Defisit Protein

4) CKCP = Cukup Kalori Cukup Protein

Tabel 6. Sebaran rumahtangga menurut kualitas konsumsi energi dan protein per orang per hari di daerah pedesaan berbagai propinsi di Indonesia*)

No.	Propinsi	DKDP ¹⁾		DKCP ²⁾		CKDP ³⁾		CKCP ⁴⁾	
		n	%	n	%	n	%	n	%
1.	DI Aceh	39	3,11	46	3,67	8	0,64	1162	82,26
2.	Sumut	92	5,89	102	6,53	22	1,41	1346	86,17
3.	Sumbar	76	5,82	15	1,15	64	4,90	1151	88,13
4.	Riau	26	3,00	15	1,73	34	3,93	791	91,34
5.	Jambi	27	4,29	14	2,23	9	1,43	579	92,05
6.	Sumsel	124	9,46	58	4,42	64	4,88	1065	81,24
7.	Bengkulu	11	2,61	2	0,47	6	1,42	403	95,50
8.	Lampung	178	12,27	33	2,27	130	8,96	1110	76,50
9.	DKI Jakarta ⁵⁾	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Jabar	243	6,81	190	5,33	42	1,18	3093	86,59
11.	Jateng	752	21,78	326	9,44	180	5,21	2195	63,57
12.	DI Yogyakarta	356	28,03	94	7,40	114	8,98	708	55,59
13.	Jatim	724	17,63	543	13,22	159	3,87	2680	65,27
14.	Bali	109	7,20	64	7,44	62	4,10	1278	84,47
15.	NTB	325	21,47	106	7,00	76	5,02	1007	66,51
16.	NTT	168	13,49	120	9,64	15	1,20	942	75,66
17.	Timtim	82	22,28	32	8,70	8	2,17	246	66,85
18.	Kalbar	86	7,87	74	6,77	29	2,65	904	82,71
19.	Kalteng	52	10,99	29	6,13	22	4,65	370	78,22
20.	Kalsel	65	5,99	70	6,45	9	0,83	942	86,74
21.	Kaltim	53	8,63	66	10,75	11	1,79	484	78,83
22.	Sulut	121	13,05	79	8,52	19	2,05	708	76,38
23.	Sulteng	45	10,69	9	2,14	82	19,48	285	67,70
24.	Sulsel	125	8,24	76	5,01	22	1,45	1294	85,30
25.	Sultara	55	4,13	60	4,50	89	6,68	1128	84,68
26.	Maluku	26	8,23	6	1,90	30	9,49	254	80,38
27.	Irian Jaya	98	21,44	25	5,47	29	6,35	305	66,74
28.	Indonesia	4058	11,91	2254	6,61	1335	3,91	26428	77,55

Keterangan :*) Kecukupan dihitung pada batas 70% kebutuhan

1) DKDP = Defisit Kalori Defisit Protein

2) DKCP = Defisit Kalori Cukup Protein

3) CKDP = Cukup Kalori Defisit Protein

4) CKCP = Cukup Kalori Cukup Protein

5) Semua sampel di DKI Jakarta dari daerah perkotaan

Tabel 7. Sebaran rumahtangga menurut kualitas konsumsi energi dan protein per orang per hari di daerah perkotaan berbagai propinsi di Indonesia*)

No.	Propinsi	DKDP ¹⁾		DKCP ²⁾		CKDP ³⁾		CKCP ⁴⁾	
		n	%	n	%	n	%	n	%
1.	DI Aceh	26	7,39	16	4,55	4	1,14	306	86,93
2.	Sumut	107	14,58	93	12,58	7	0,95	532	71,99
3.	Sumbar	77	16,56	51	10,97	13	2,80	324	69,68
4.	Riau	47	10,13	39	8,41	13	2,80	365	78,66
5.	Jambi	33	10,68	44	14,24	1	0,32	231	74,76
6.	Sumsel	104	14,63	61	8,58	6	0,84	540	75,95
7.	Bengkulu	10	5,43	6	3,26	3	1,63	165	89,67
8.	Lampung	97	22,93	36	8,51	30	7,09	260	61,46
9.	DKI Jakarta	430	20,65	298	14,31	55	2,64	1299	61,39
10.	Jabar	200	14,23	133	9,47	19	1,35	1053	74,95
11.	Jateng	294	22,49	183	14,00	46	3,52	784	59,88
12.	DI Yogyakarta	178	37,16	62	12,94	22	4,59	217	45,30
13.	Jatim	304	22,30	250	18,34	27	1,98	782	57,37
14.	Bali	60	11,13	24	4,45	28	5,19	427	79,22
15.	NTB	130	22,34	38	6,53	17	2,92	397	68,21
16.	NTT	47	12,50	23	6,12	8	2,13	298	79,26
17.	Timtim ⁵⁾	-	-	-	-	-	-	-	-
18.	Kalbar	39	9,26	73	17,34	1	0,24	308	73,16
19.	Kalteng	10	5,65	15	8,47	1	0,56	161	85,32
20.	Kalsel	54	11,54	67	14,32	7	1,50	340	72,65
21.	Kaltim	12	5,08	18	7,63	4	1,69	202	85,59
22.	Sulut	42	9,98	21	4,99	14	3,33	344	81,71
23.	Sulteng	14	7,45	9	4,79	12	6,38	153	81,38
24.	Sulsel	102	13,60	93	12,40	13	1,73	542	72,27
25.	Sultara	33	5,27	44	7,03	6	0,96	543	86,74
26.	Maluku	55	30,05	17	9,29	12	6,56	99	54,10
27.	Irian Jaya	25	14,04	15	8,43	11	6,18	127	71,95
28.	Indonesia	2530	16,39	1729	11,20	380	2,46	10799	69,95

Keterangan : *) Kecukupan dihitung pada batas 70% kebutuhan

1) DKDP = Defisit Kalori Defisit Protein

2) DKCP = Defisit Kalori Cukup Protein

3) CKDP = Cukup Kalori Defisit Protein

4) CKCP = Cukup Kalori Cukup Protein

5) Semua sampel di Timtim dari daerah pedesaan

Menurut studi ini, prevalensi rumahtangga yang mengalami defisit kalori dan protein (DKDP) di Indonesia mencapai 13.31%; tertinggi di DI Yogyakarta (30.53%), terendah di propinsi Bengkulu (3.47%). Hasil terdapat 12 propinsi dengan tingkat prevalensi di atas 10%, lima di antaranya bahkan di atas 20%, yakni DKI Jakarta, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Nusatenggara Barat (NTB), dan Timor Timur (Timtim). Data prevalensi yang disajikan dalam tulisan ini diperoleh dengan cara yang berbeda dengan yang dilakukan peneliti lain terdahulu, karena itu tidak dapat saling dibandingkan.

Setelah mempelajari data sebaran rumahtangga menurut tingkat konsumsi energi antara daerah pedesaan dan perkotaan, tampaknya terdapat beberapa kelemahan pada data konsumsi rumahtangga hasil SUSENAS 1984 dan tahun-tahun sebelumnya. Kelemahan itu bersumber dari cara mengumpulkan data konsumsi. Pengumpulan data konsumsi dalam SUSENAS dilakukan dengan cara *recall* seminggu terakhir dihitung sejak awal wawancara; jenis bahan makanan dan minuman yang sulit ditaksir ukuran, takaran, atau bobotnya tidak dicatat dalam bentuk kuantitas, melainkan dalam bentuk harga (12). Sebagai akibatnya dapat terjadi (a) informasi "makan di luar rumah" tidak tercatat atau kurang lengkap; (b) bahan pangan yang hanya dicatat dalam bentuk harga terluput dari perhitungan energi dan protein; dan (c) ada sejumlah orang yang tidak tercatat sebagai konsumen sehingga dalam perhitungan tingkat konsumsi rumahtangga terjadi perkiraan rendah (*underestimation*). Di samping itu, Daftar Komposisi Bahan Makanan Jadi belum tersedia sehingga sumbangan energi dan zat gizi bahan makanan jenis ini sulit diperkirakan.

Karena tidak tersedia informasi tentang besar pengaruh masing-masing faktor tersebut di atas, maka dalam studi ini tidak dilakukan penyesuaian terhadap data konsumsi rumahtangga yang diperoleh dari Biro Pusat Statistik, Jakarta. Tetapi sebelum analisis dilakukan pembersihan data dengan mengeluarkan data konsumsi yang ekstrim (kira-kira 5% dari seluruh sampel SUSENAS 1984).

Beberapa peneliti (1),(2),(3) beranggapan bahwa pada data konsumsi hasil SUSENAS terdapat "taksiran rendah" (*underestimation*).

Karena itu Sayogyo (1),(2) dan Hutabarat (13) mengadakan penyesuaian sebelum melakukan analisis lebih lanjut.

Jika konsumsi protein dilihat terpisah dari konsumsi energi, tampak bahwa rata-rata konsumsi protein berada di atas rata-rata kebutuhan, kecuali di pulau Jawa selain Jawa Barat, dan Bali (Tabel 4).

Dengan menggunakan angka 70% kebutuhan sebagai batas defisit, maka prevalensi rumahtangga yang mengalami defisit protein di Indonesia 16.8%, di pedesaan 15.8% dan di perkotaan 18.9%. Prevalensi defisit kalori untuk tingkat nasional 21.4%, pedesaan 18.5% dan perkotaan 27.6% (Tabel 7 dan 8). Adanya korelasi positif antara prevalensi defisit kalori dan defisit protein memberi petunjuk bahwa sumber energi juga merupakan sumber utama protein dalam susunan hidangan rumahtangga bersangkutan. Asumsi ini didukung oleh fakta bahwa di antara 21.4% rumahtangga yang tergolong defisit kalori, 13.3% juga mengalami defisit protein; sebaliknya, di antara 78.7% rumahtangga yang konsumsi energinya cukup, hanya 3.5% yang tergolong defisit protein. Ini berarti bahwa di Indonesia, pemecahan masalah defisit kalori dapat sekaligus merupakan upaya pemecahan masalah defisit protein.

UCAPAN TERIMA KASIH

Para penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Biro Pusat Statistik atas kerjasama dan kesediaan memberikan data primer SUSENAS 1984. Penghargaan yang sebesar-besarnya disampaikan kepada anggota tim peneliti, khususnya Sdr. Sjafrudin, BBA, atas bantuan dalam pengolahan data.

RUJUKAN

1. Sayogyo. Golongan Miskin dan Partisipasinya dalam Pembangunan. Prisma 1977, 6(3):10-17.
2. Sayogyo; Suhardjo; dan Khumaidi. Tingkat Pendapatan dan Kecukupan Gizi. Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi, Bogor, 1978.

3. Abunain, Djumadias. Nutrition Intake in Indonesia. Bogor: Nutrition Research and Development Centre, 1979.
4. Sukhatme, P.V. The World Hunger and Future Needs in Food Supply. Journal of the Royal Statistical Society 1961, 124:483.
5. Reutlinger, S.; and M. Selowsky. Malnutrition and Poverty: Magnitude and Policy. World Bank Staff Occasional Paper, 1976, No.23.
6. Reutlinger, S.; and Alderman. The prevalence of Calorie-Deficient in Developing Countries. World Development 1980, 8:399-411.
7. Sudjono, M. dkk. Profil Kelompok Masyarakat dengan Tingkat Konsumsi Kalori dan Protein Lebih Rendah dari Tingkat Kebutuhannya. Bogor : Pusat Penelitian dan Pengembangan Gizi, 1986.
8. Direktorat Gizi, Departemen Kesehatan R.I. Daftar Komposisi Bahan Makanan. Jakarta : Bhratara, 1972.
9. Norris, T. Dietary Survey : Their Technique and Interpretation. Rome : FAO, 1949.
10. Abunain, Djumadias, dkk. Kecukupan Kalori, Protein dan Zat Gizi untuk Indonesia. Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi, Bogor, 1978.
11. Muhilal, dkk. Kecukupan Gizi, Masalah Gizi Utama dan Kesadaran Gizi Nasional. Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi, Jakarta, 1983.
12. Biro Pusat Statistik. Pengeluaran untuk Konsumsi Penduduk Indonesia. Jakarta : Biro Pusat Statistik, 1981.
13. Hutabarat, P.M. Proyeksi Distribusi Konsumsi Menurut Kelompok Pendapatan di Indonesia Tahun 1990. Bogor : Fakultas Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, 1979. Tesis MS.